

## Studi Etnografi Organisasi pada Harmonisasi *Hamemayu Hayuning Bawana* dan *Environmental Social Governance* dalam Transformasi SMK Menuju *School 5.0*

Syifa Aida Khoirunnisa<sup>1</sup>, Azizah Iswan Ramadhani<sup>2</sup>, Fitriana Luvitasari<sup>3</sup>, Irman Ramadhan<sup>4</sup>, Putri Khoirunisa Nurfadila<sup>5</sup>, Rahmania Utari<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,6</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>5</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

### Article Info

#### Kata Kunci:

ESG  
Hamemayu hayuning  
bawana  
Kearifan local  
Etnografi organisasi  
*School 5.0*  
SMK

### ABSTRAK

SMK dituntut melakukan transformasi untuk merespons tantangan *society 5.0* dan isu lingkungan hidup. Transformasi tersebut tidak dapat bertumpu pada pendekatan modern semata karena persoalan pendidikan tidak hanya bersifat teknologis. Riset ini menelaah tentang bagaimana SMK di wilayah Kota Yogyakarta mengadaptasi pendekatan *Environmental Social Governance* (ESG) dan falsafah Jawa *Hamemayu Hayuning Bawana* (HHB) dalam transformasi SMK menuju *School 5.0*. Tujuan riset ini untuk 1) mendeskripsikan makna falsafah HHB dalam praktik pendidikan di SMK, 2) mengidentifikasi implementasi prinsip ESG dalam pengelolaan SMK, 3) memetakan kesenjangan antara kondisi eksisting SMK di Kota Yogyakarta dengan paradigma *School 5.0*, 4) mengidentifikasi bentuk harmoni antara HHB dan ESG dalam kehidupan sekolah. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada dua SMK di Kota Yogyakarta selama enam bulan, dengan analisis data model Spradley. menunjukkan bahwa HHB dipahami sebagai landasan moral-spiritual dalam pembentukan karakter, kepedulian lingkungan, dan pengembangan teknologi humanis, meskipun belum terintegrasi secara sistemik dalam tata kelola sekolah serta menunjukkan adanya tiga tema utama ESG yang muncul: pendidikan karakter, kolaborasi sosial, dan tata kelola akuntabel. Transformasi menuju *School 5.0* ditandai oleh penguatan budaya ramah lingkungan, tata kelola etis dan cerdas, serta pelestarian kearifan lokal sebagai basis keberlanjutan sekolah.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Syifa Aida Khoirunnisa  
Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,  
Yogyakarta, Indonesia  
Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Email: [syifa7552fipp.2024@student.uny.ac.id](mailto:syifa7552fipp.2024@student.uny.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks, seperti persoalan sampah [1] deforestasi berkelanjutan [2], serta eksploitasi sumber daya alam [3], yang belum diimbangi dengan upaya restorasi dan pelestarian yang memadai. Timbunan sampah nasional mencapai sekitar 35,3 juta ton per tahun, tetapi hanya 38,6% yang terkelola dengan baik [4]. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi nyata dalam pengelolaan lingkungan sehingga perlu adanya penyelesaian persoalan lingkungan yang tidak hanya bergantung pada pendekatan teknis, tetapi juga memerlukan transformasi nilai yang dapat membentuk perilaku ekologis masyarakat.

Salah satu faktor penyebab persoalan lingkungan yang terus berulang adalah pendekatan kebijakan yang cenderung teknokratis dan kurang mempertimbangkan nilai serta budaya lokal [5]. Padahal, dimensi budaya berperan penting dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat. Dalam konteks budaya Jawa, falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* (HHB) merupakan nilai luhur yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan [6],[7]. Falsafah ini diangkat sebagai basis budaya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2008 dan mulai diintegrasikan ke dalam berbagai institusi, termasuk sekolah negeri, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun, studi pendahuluan menunjukkan bahwa sosialisasi nilai HHB di SMK masih bersifat formal dan administratif, belum menyentuh ranah praktis pembelajaran dan perilaku siswa, sementara pemahaman generasi muda terhadap falsafah ini semakin memudar [8].

Selain melalui pendekatan budaya, tantangan lingkungan juga dapat direspon melalui penguatan pendidikan, sains, dan teknologi. SMK memiliki posisi strategis dalam hal ini dibandingkan SMA karena berfokus pada penguasaan keterampilan terapan yang langsung berhubungan dengan dunia industri dan tantangan era *society 5.0*, yaitu sebuah era yang dicirikan oleh kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta orientasi pada kesejahteraan manusia [9]; [10]. Kedekatan struktural SMK dengan dunia industri, yang semakin dihadapkan pada tuntutan praktik berkelanjutan melalui prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadikannya ruang yang relevan untuk menginternalisasikan nilai-nilai ekologis, etika kerja, dan tanggung jawab sosial secara kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, SMK tidak hanya berfungsi menyiapkan tenaga kerja terampil, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang berkarakter dan berwawasan lingkungan.

Dalam konteks inilah muncul konsep *School 5.0*, yaitu paradigma pendidikan yang mengintegrasikan kemajuan teknologi, nilai kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan. Transformasi sekolah menuju *School 5.0* bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan juga transformasi nilai dan tata kelola sekolah agar lebih humanistik, adaptif, dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sekolah untuk mewujudkan keseimbangan tersebut adalah penerapan prinsip *Environmental, Social, Governance* (ESG), yakni kerangka manajemen yang menekankan tiga aspek penting: pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang transparan [11]. Integrasi nilai ESG dalam pendidikan dapat mendorong sekolah untuk tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga membangun budaya tanggung jawab sosial dan kepedulian ekologis. Namun, studi pendahuluan menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip ESG masih relatif asing di lingkungan SMK, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Sejumlah riset terdahulu telah mengkaji penerapan falsafah HHB dalam berbagai bidang, seperti dunia perusahaan [12], kehidupan masyarakat [13], pengelolaan lingkungan [14]; [15], hingga desain interior [16]. Namun, belum ada kajian yang secara eksploratif menelaah bagaimana harmonisasi nilai HHB dan prinsip ESG dapat diterapkan dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya di SMK. Ketiadaan kajian tersebut menyebabkan belum munculnya model konseptual yang menjelaskan interaksi antara nilai lokal dan standar global dalam mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan. Akibatnya, upaya penguatan karakter dan tanggung jawab lingkungan di SMK cenderung bersifat seremonial dan belum menjadi bagian integral dari manajemen sekolah.

Secara filosofis falsafah HHB dan prinsip ESG memiliki semangat yang sejalan, HHB menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, sementara ESG menekankan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keduanya mengandung nilai harmoni dan tanggung jawab yang dapat saling memperkuat sehingga integrasi kedua nilai ini berpotensi menghasilkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya menumbuhkan kompetensi teknis, tetapi juga karakter ekologis dan etika sosial yang kuat.

Berbeda dengan riset terdahulu yang cenderung membahas HHB atau ESG secara terpisah, riset ini menawarkan perspektif integratif yang menghubungkan kearifan lokal dan standar global untuk merumuskan model transformasi pendidikan vokasi menuju *School 5.0*. Model ini berpotensi menjadi rujukan kebijakan dan prototipe pengembangan SMK di berbagai daerah yang ingin mengintegrasikan kearifan lokal setempat dengan standar global secara sistemik dan berkelanjutan. Dengan demikian, riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi kearifan lokal (HHB) dan standar global (ESG) sebagai dasar transformasi SMK menuju *School 5.0*.

Riset ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan makna falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dijalani dan dipahami oleh warga sekolah dalam praktik pendidikan di SMK, (2) mengidentifikasi sejauh mana prinsip

*Environmental Social Governance* telah diterapkan dalam pengelolaan SMK (3) memetakan potret kesenjangan antara kondisi eksisting SMK di Kota Yogyakarta dengan paradigma *School 5.0.*, (4) mengidentifikasi bentuk harmoni antara falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dan *prinsip Environmental Social Governance* dalam kehidupan sekolah sebagai upaya mendukung proses transformasi SMK menjadi *School 5.0.*

## 2. METODE

Fokus riset berlangsung di dua sekolah, yaitu SMK Negeri A dan SMK Negeri B Yogyakarta (nama sekolah disamarkan dalam tulisan ini sebagai bagian dari etika riset). Pemilihan kedua sekolah berdasarkan letaknya yang berada di wilayah urban dan pusat kota Yogyakarta dan keduanya mengadopsi konsep sekolah berbasis budaya (sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 66 Tahun 2013 tentang kurikulum pendidikan berbasis budaya), serta terlibat dalam program Sekolah Adiwiyata.

Pengambilan data dalam riset ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara non-partisipatif di lingkungan kedua sekolah sepanjang Juli hingga September 2025 dengan tujuan mengamati secara langsung interaksi dan aktivitas warga sekolah tanpa keterlibatan peneliti dalam kegiatan mereka untuk menjaga objektivitas riset. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan fleksibel sesuai konteks riset. Dua kepala sekolah berperan sebagai *key informant*, sedangkan penambahan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu metode penentuan sampel di mana informan awal merekomendasikan informan berikutnya yang dianggap relevan dengan fokus riset [17]. Melalui teknik ini, jumlah informan berkembang menjadi 26 orang, yang terdiri atas dua kepala sekolah, dua wakil kepala sekolah, dua kepala jurusan, empat guru, lima belas siswa, serta satu budayawan Jawa. Analisis data dilakukan dengan melakukan validasi lintas peran informan atau triangulasi data sehingga tidak ada satu kelompok yang mendominasi penafsiran hasil riset. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai kebijakan, peraturan, dan standar operasional prosedur (SOP) sekolah guna memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan pendekatan etnografi organisasi dan multi kasus sebagaimana dikembangkan oleh Stake [18], Marcus [19] dan Cassell & Symon [20]. Di tahap awal data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis etnografi model Spradley yang terdiri atas 1) membuat tulisan etnografis, 2) analisis hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, 3) analisis domain, 4) analisis taksonomi, 5) analisis hubungan tema, 6) interpretasi dan validasi. Kemudian dilakukan analisis lintas sekolah setelah proses penemuan dan pemantapan tema pada masing-masing sekolah selesai, sehingga perbandingan dilakukan berdasarkan struktur makna yang telah terbentuk secara utuh pada setiap konteks kasus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Makna falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang dijalani dan dipahami warga sekolah dalam praktik pendidikan di SMK

Berdasarkan wawancara dengan informan budayawan Jawa, *Hamemayu Hayuning Bawana* (HHB) sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Yogyakarta, namun kedalaman pemahamannya masih dangkal, lebih sering dimaknai secara ekologis daripada prinsip kehidupan yang holistik. Menurutnya, dibandingkan wilayah tetangganya seperti Sleman dan Gunungkidul, kota Yogyakarta mengalami penurunan adopsi nilai Jawa akibat modernitas dan gaya hidup individualistik: “*Kalau di kota nilai-nilai seperti sinoman, gotong royong, sudah tidak subur. Lingkungan sosialnya berbeda*”.

Terlepas dari tekanan modernitas dan individualisme, secara umum riset ini menemukan bahwa falsafah HHB dipahami warga sekolah sebagai pedoman moral dan kultural dalam membentuk karakter siswa, mengelola lingkungan, dan mengembangkan inovasi pendidikan. Makna HHB muncul melalui perilaku, kebijakan, dan praktik keseharian warga sekolah yang mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, dan teknologi [21]. Hasil analisis domain, taksonomi dan tema budaya menunjukkan makna falsafah HHB diinterpretasi menjadi empat tema, yaitu:

- a. Teknologi humanis dan ekologis; teknologi dikembangkan untuk memayu kehidupan, bukan merusaknya
- b. Pelestarian nilai lokal dalam modernitas; nilai-nilai Jawa seperti ngajeni dan tepa selira menjadi dasar etika profesional siswa
- c. Gotong Royong sebagai modal sosial sekolah; Kerjasama antar-civitas menjadi simbol hidupnya falsafah HHB di lingkungan sekolah.

Makna-makna tersebut dipahami warga sekolah melalui praktik yang dikembangkan di sekolah, antara lain pembiasaan disiplin, kebersihan, program Adiwiyata, Bank Sampah, penghijauan, inovasi *green*

*technology, teaching factory* ramah lingkungan, inovasi energi bersih, nilai *ngajeni, tepa selira*, dan *matur nuwun*.

Analisis lintas sekolah menemukan pemaknaan HHB di SMKN A menonjol dalam internalisasi nilai moral-spiritual, sementara SMKN B lebih sistematis dan ekologis melalui kebijakan dan tata kelola yang terintegrasi. Selain itu, terdapat isu penting terkait makna HHB di kedua sekolah, yaitu:

a. Masih adanya gap dalam memahami HHB

Guru memandang HHB sebagai nilai moral dan ketertiban sosial, sedangkan siswa melihatnya sebagai aturan, kewajiban formal. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa makna HBB belum menjadi habitus kolektif pada warga sekolah. Habitus adalah pola pikir, sikap, dan kebiasaan bertindak yang sudah tertanam dalam diri seseorang akibat proses sosialisasi dan pengalaman hidup di dalam suatu lingkungan sosial [18]. Menurut Bourdieu, habitus dapat dilakukan melalui internalisasi dan objektifikasi serta institusionalisasi serta reflektif kolektif. Nilai kolektif yang dikembangkan sekolah bisa jadi menimbulkan dinamika tajam jika proses internalisasi dan objektifikasi belum dilalui dengan lancar [19].

b. HHB perlu dilakukan secara reflektif dan diserap menjadi sistem etika di sekolah untuk membangkitkan kesadaran siswa

Salah seorang guru di SMKN A Yogyakarta mengatakan, “*Kami mengenalkan nilai-nilai Jawa seperti hormat dan tanggung jawab, tapi tidak semua guru bisa mencontohkan di kelas. Kadang sibuk dengan administrasi*”. Terdapat juga ungkapan, “*SMK itu kan orientasinya kerja, jadi kadang yang penting anak bisa keterampilan dulu, nilai-nilai itu nanti menyusul*”. Ekspresi ini menggambarkan tekanan modernitas membuat nilai-nilai HHB belum menjadi sistem etika yang menjiwai tata kelola sekolah.

c. HHB masih perlu diperluas penerapannya dalam hal memperkuat moral dan karakter peserta didik

Informan budayawan Jawa menyatakan, “*Memayu Hayuning Bawana itu diimplementasikan di dalam ESG, sehingga ESG-nya itu memang dalam pendidikan, jadi ketika dia mengolah strategi pendidikannya, maka dia tidak hanya mengolah nilainya tapi juga mengolah psikologinya anak menjadi orang yang lebih humble, lebih kuat, tahan terhadap zaman, tidak pantang menyerah, seperti sekarang kan banyak anak dikit-dikit mau bunuh diri, karena tidak tahan. Nah kekuatan dan ketahanan ini bagian penting juga dari Hamemayu Hayuning Bawana*”. Dengan demikian makna HHB diharapkan dapat reaktualisasi lebih holistik untuk membentuk ketahanan mental siswa.

### 3.2. Prinsip *Environmental Social Governance* (ESG) yang telah diterapkan di SMK

Hasil analisis tema budaya menunjukkan kedua sekolah menerapkan *Environmental Social Governance* (ESG) dalam aspek administratif maupun budaya sekolah. Tema-tema yang muncul berdasarkan praktik ESG di kedua SMK adalah

- a. Pendidikan Karakter yang relevan dengan prinsip ESG; pembentukan karakter religius, disiplin, dan peduli lingkungan menjadi bentuk konkret implementasi ESG di sekolah
- b. Kolaborasi Sosial dan Gotong Royong: prinsip sosial ESG diwujudkan melalui keterlibatan seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar
- c. Governance Berbasis Sistem dan Akuntabilitas: pengelolaan sekolah berbasis SOP dan manajemen mutu menjamin keberlanjutan nilai-nilai ESG lintas generasi kepemimpinan.

Praktik prinsip ESG pada domain lingkungan salah satunya dicontohkan Kepala SMKN A, “*Setiap hari Jumat pagi itu ada yang namanya SEMUTLIS, sepuluh menit untuk lingkungan sekolah. Kita ingin memahamkan bahwa kita harus peduli lingkungan*”. Adapun pada domain sosial, guru Pendidikan Bahasa Jawa SMKN B menyatakan: “*Setiap pagi siswa datang mengucapkan salam dan selamat pagi. Kami juga punya gerakan Anti-Bullying dan Sekolah Ramah Anak*”. Praktik prinsip ESG pada domain tata kelola salah satunya diwujudkan melalui manajemen mutu tahunan dan SOP kebijakan yang menjamin kesinambungan program lingkungan dan sosial. Mengenai hal ini, Kepala SMKN A mengungkapkan: “*Sistem di SMK A ini sudah terpolo. Jadi siapapun pemimpinnya akan melaksanakan sistem itu. Tidak bisa semerta-merta merubah kebijakan tanpa melalui alur*”.

Walaupun ESG relatif telah diterapkan di kedua sekolah, namun penting menjadi catatan bahwa budaya ekologis masih perlu ditingkatkan di kedua sekolah, karena kegiatan lingkungan masih belum sistemik. Hasil observasi menunjukkan aktivitas siswa masih belum cukup terkontrol dalam kegiatan bersih-bersih sekolah. Begitu juga pada aspek sosial, partisipasi kolektif perlu tingkatkan. Adapun dalam aspek tata kelola, perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan adopsi prinsip ESG yang lebih sistematis.

### 3.3. Kondisi eksisting SMK di Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan *School 5.0*.

Ditemukan tiga tema besar yang mencirikan praktik pendekatan *School 5.0* di kedua SMK, yaitu: (1) budaya ramah lingkungan, (2) *Smart-Ethical Governance*, dan (3) penerapan kearifan lokal.

Tabel 1. Kondisi SMK N 2 dan 3 Yogyakarta Berdasar Pendekatan *School 5.0*

Ciri <i>School 5.0</i> (Ahmad <i>et.al</i> , 2023)	SMKN A Yogyakarta	SMKN B Yogyakarta	Catatan Etnografis
<i>Personalized/human-centered</i>	Kuat; ritual ekologis, tanggung jawab personal	Kuat; <i>Project-Based Learning</i> , <i>student center</i>	Di SMKN A, personalisasi tampak dalam pembiasaan ekologis harian seperti <i>Semutlis</i> (10 menit peduli lingkungan), pengelolaan <i>bank sampah</i> sebagai kas kelas, dan penerapan budaya 5R di bengkel. Di SMKN B, personalisasi lebih banyak muncul melalui <i>Project-Based Learning</i> dan <i>teaching factory</i> bernilai sosial-lingkungan yang memberi ruang bagi siswa sebagai agen perubahan.
<i>Collaboration &amp; connectivity</i>	Sedang–kuat; apel jurusan, lintas kelas	Kuat; multi- aktor, festival, jejaring DUDI	Di SMKN A, kolaborasi dibangun melalui mekanisme internal seperti apel jurusan bergilir, kerja bakti lintas kelas, dan pendampingan guru sebagai praktik pembiasaan etika kerja. Sementara itu, di SMKN B, kolaborasi bersifat multi-aktor, melalui festival budaya, ketarunaan, dan gerakan Jumat Bersih.
<i>Technology-enabled learning</i>	Sedang; <i>prototipe IoT</i>	Kuat; SIM/ERP, <i>dashboard</i> , AR/VR/IoT	Di SMKN A, teknologi hadir melalui prototipe IoT (misalnya pendeteksi serangga dan irigasi otomatis). Di SMKN B, teknologi menjadi bagian dari sistem tata kelola dan pembelajaran melalui SIM, ERP, serta integrasi AR/VR/IoT dalam <i>teaching factory</i> .
<i>Data-driven governance</i>	Sedang–kuat (review mutu, SPMI)	Kuat; BLUD transparan, indikator ESG	Di SMKN A, tata kelola dijalankan melalui sistem penjaminan mutu dan <i>management review</i> tahunan. Di SMKN B, tata kelola lebih eksplisit berbasis data melalui BLUD transparan, indikator ESG.
<i>Value-based/ethical</i>	Kuat; <i>Ngajeni</i> , Pendidikan Khas Kejojgaan, HHB	Kuat; nilai Jawa = etika ESG	Di SMKN A, nilai-nilai seperti <i>ngajeni</i> , <i>matur nuwun</i> , dan HHB diinternalisasi melalui Pendidikan Khas Kejojgaan, teladan guru, dan ritual harian. Di SMKN B, nilai Jawa seperti <i>guyub rukun</i> , <i>tepa selira</i> , dan <i>eling lan waspada</i> diformalkan sebagai etika lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
<i>Flexibility &amp; lifelong</i>	Sedang–kuat; tahap target per jenjang	Kuat; kurikulum adaptif, <i>up/reskilling</i>	Di SMKN A, fleksibilitas dibangun melalui tahapan pembentukan karakter per jenjang (X–XII) dan budaya industri yang melatih adaptabilitas kerja. Di SMKN B, tampak melalui kurikulum adaptif, magang DUDI.

Sumber: Hasil Data

Dilihat dari ciri *School 5.0* menurut Ahmad [22], kedua sekolah secara umum telah menunjukkan transformasi menuju *School 5.0*. SMKN B Yogyakarta relatif lebih lebih terstruktur dalam mengintegrasikan

teknologi, budaya, dan keberlanjutan. Namun demikian, kedua sekolah mengakui masih adanya hambatan dalam beradaptasi dengan teknologi di era *society 5.0* ini.

Hambatan pertama berasal dari kompetensi digital guru dan siswa. Salah satu siswa di SMKN B menuturkan “*Masih banyak guru yang belum bisa menggunakan media digital seperti Kahoot, Google Classroom, apalagi membuat media pembelajaran sendiri*”. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya tanggung jawab administratif guru yang membuat pengembangan kompetensi digital guru terhambat [23]. Persoalan kompetensi digital ini juga disebabkan adanya pola pikir bahwa teknologi itu rumit, sebagaimana dituturkan Kepala Sekolah SMKN B Yogyakarta: “*Tidak semua guru familiar dengan teknologi terbaru*”. Hambatan kedua berasal dari keterbatasan infrastruktur dan dukungan teknis. Salah seorang guru mengungkapkan “*Mobil listrik di luar sana itu sudah luar biasa, tempat kita nggak ada, mobil listrik sudah berkeliaran di jalan-jalan raya, di sekolah kita nggak ada mobil listrik, masih menggunakan mobil-mobil atau benderaan mesin yang masih konvensional*”.

Bertolak dari paparan di atas, ada tiga lapisan utama yang perlu menjadi perhatian untuk transformasi sekolah menuju *school 5.0*, yaitu (1) lapisan teknis (hambatan kompetensi digital dan infrastruktur), (2) lapisan struktural (perlu dukungan sistem dan pembiayaan), dan (3) lapisan budaya (paradigma terhadap kebermanfaatan teknologi dan kemauan belajar terus-menerus).

### **3.4. Bentuk harmoni falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dan *Environmental Social Governance* dalam kehidupan sekolah untuk mendukung proses transformasi SMK menjadi School 5.0.**

Harmoni HHB dan ESG yang mendukung transformasi *School 5.0* tampak nyata dalam praktik sekolah yang dicirikan menjadi empat bentuk utama, yaitu (1) harmoni nilai kultural, (2) integrasi lingkungan dan teknologi, (3) nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) tata kelola berbasis nilai humanis.

Kedua sekolah secara umum memiliki beragam program dan aktivitas yang mengarah pada harmonisasi falsafah HHB dan ESG dalam kehidupan sekolah untuk mendukung proses transformasi SMK menjadi *School 5.0*. Kepala SMKN A Yogyakarta, menyatakan: “*Ketika kita merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberi manfaat pada kita*”. Prinsip ini diinternalisasi melalui kegiatan kebersihan sekolah serta bank sampah yang dikelola siswa sebagai sarana tanggung jawab kolektif. Sementara di SMKN B, prinsip ESG tercermin dalam tata kelola berbasis data dan kolaborasi dengan industri, masyarakat, dan siswa. SMKN A Yogyakarta dengan model *The Industrial Culture School* menonjolkan konsep industri humanis dan berkarakter lingkungan, sedangkan SMKN B Yogyakarta mengembangkan tata kelola digital berbasis data dan teknologi hijau.

Meskipun praktik HHB dan ESG telah berjalan, pembudayaan keduanya masih bersifat fragmentaris dan tergantung dari inisiatif guru secara individual. Hal ini tercermin dari ekspresi guru: “*Kami coba sisipkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan hormat di setiap pelajaran. Tapi kalau tidak ada kebijakan dari atas, ya berhenti di guru masing-masing*”. Hambatan integrasi HHB dan ESG juga karena nilai keduanya masih dipandang simbolik dan administratif serta dipahami secara terpisah. Temuan riset ini juga menegaskan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah, berkontribusi signifikan dalam menjembatani falsafah HHB dengan prinsip ESG di tingkat praktik sekolah. Desain kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMKN A menciptakan sistem yang lebih terpolo dan memadukan nilai lokal ke dalam kebijakan dan struktur operasional sekolah, sejalan dengan temuan literatur yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan integrasi nilai spiritual dalam konteks sekolah mampu membentuk budaya sekolah yang adaptif dan bernilai (misalnya melalui model kepemimpinan transformasional yang mengintegrasikan visi, nilai humanis, dan perubahan sistemik dalam menghadapi era *Society 5.0*) [24], [25].

Agar lebih terinstitusionalisasi, Dinas Pendidikan DIY dapat mengembangkan pedoman roadmap *School 5.0* dengan mengintegrasikan HHB dan ESG dan memfasilitasi pelatihan guru tentang integrasi kedua nilai dalam kurikulum dan kokurikuler. Selain itu perlu dilakukan supervisi dan monitoring serta melekatkan program tersebut dalam komunitas belajar guru-guru SMK.

## **4. KESIMPULAN**

Hasil riset menunjukkan nilai-nilai HHB dan ESG memiliki spirit membangun keseimbangan antara kemajuan, kemanusiaan dan kelestarian lingkungan. Kedua sekolah memperlihatkan upaya untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan sistem sosial melalui praktik yang sejalan dengan nilai-nilai HHB dan ESG, Falsafah HHB memberi makna spiritual dan moral pada ESG, sementara ESG menyediakan sistem dan struktur agar nilai-nilai HHB dapat hidup secara konkret dalam tata kelola sekolah. Meskipun demikian, HHB masih perlu diperkuat internalisasinya agar menjadi sistem etika di sekolah. Begitu juga dengan penerapan ESG yang masih bersifat parsial dan belum sistemik. Kegiatan lingkungan belum sepenuhnya menjadi habitus ekologis siswa, dan partisipasi sosial masih cenderung seremonial. Di sisi tata kelola, mekanisme evaluasi dan adopsi

prinsip ESG masih perlu diperkuat agar nilai-nilai keberlanjutan mampu melewati pergantian kepemimpinan dan menjadi roh kelembagaan.

Dari perspektif transformasi menuju *School 5.0*, kedua SMK telah memperlihatkan adanya langkah awal menuju pendidikan yang humanistik, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Hal ini tercermin dari program dan aktivitas yang bersentuhan dengan program ramah lingkungan, *smart-ethical governance*, dan penerapan kearifan lokal. Hambatan teknis dan kultural ditemukan antara lain pada kompetensi digital guru yang belum merata, infrastruktur yang terbatas, serta pandangan konservatif terhadap teknologi yang membuat proses inovasi berjalan lambat. Hal ini mengukuhkan bahwa transformasi menuju *School 5.0* tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga rekulturisasi nilai dan restrukturisasi sistem dukungan.

Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan pada konteks geografis dan kultural karena hanya dilakukan di dua SMK di Kota Yogyakarta, serta pada jumlah dan tipe kasus yang terbatas, sehingga temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara langsung ke seluruh SMK di Indonesia tanpa mempertimbangkan kekhasan konteks lokal masing-masing daerah.

Riset ini berimplikasi pada penguatan teori budaya organisasi sekolah, yang memasukkan unsur etnografis dalam transformasi sekolah. Secara praktis riset ini berimplikasi pada perlunya pengambil kebijakan mengintegrasikan transformasi sekolah dengan nilai-nilai lokal.

Temuan riset ini juga membuktikan adanya jarak antara kebijakan budaya dan implementasinya pada institusi pendidikan khususnya SMK di kota Yogyakarta. Riset ini merekomendasikan agar Dinas Pendidikan DIY memperkuat keistimewaan Yogyakarta sekaligus menjembatani transformasi SMK menuju *School 5.0* dengan memperkuat internalisasi kearifan lokal dengan prinsip global. Dinas Pendidikan DIY dan SMK di wilayahnya dapat mengembangkan roadmap *School 5.0* berbasis HHB dan ESG. Setelahnya dapat diikuti dengan pelatihan guru, fasilitasi tata kelola yang berbasis nilai HHB dan ESG, dukungan sarana dan melekatkan kedua nilai tersebut dalam supervisi sekolah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tim riset disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi hibah sehingga riset ini berjalan. Terima kasih juga tim sampaikan kepada Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai pendamping dan pengarah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada warga sekolah di tempat kami meneliti dan budayawan yang memberikan insight dalam memaknai falsafah HHB di era kini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. L. Priandaru, "11,3 Juta Ton Sampah Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik," 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://lestari.kompas.com/read/2024/07/28/130000286/113-juta-ton-sampah-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>
- [2] S. S. A. Ansar, A. Rahmawati, dan R. D. Arrahman, "Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia," *Indones. J. Law Justice*, vol. 1, no. 4, hlm. 11, Jun 2024, doi: 10.47134/ijlj.v1i4.2740.
- [3] Feryl Ilyasa, M. Zid, dan M. Miarsyah, "Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan," *J. Ilm. Pendidik. Lingkungan. Dan Pembang.*, vol. 21, no. 01, hlm. 43–58, Apr 2020, doi: 10.21009/PLPB.211.05.
- [4] KLHK, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2023," 2023. Diakses: 15 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5946](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5946)
- [5] G. Nova Sudrajat Nur, "EKOLOGI BUDAYA SEBAGAI WAWASAN POKOK DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA," *J. TAMBORA*, vol. 5, no. 1, hlm. 27–33, Feb 2021, doi: 10.36761/jt.v5i1.995.
- [6] D. K. Ainia, "KONSEP METAFISIKA DALAM FALSAFAH JAWA HAMEMAYU HAYUNING BAWANA," *J. Filsafat Indones.*, vol. 4, no. 2, hlm. 195–201, Sep 2021, doi: 10.23887/jfi.v4i2.30591.
- [7] B. A. P. Priyudahari dan L. D. Prasojo, "Hamemayu Hayuning Bawana Based Education Management:," dalam *Proceedings of the 2nd Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy (YICEMAP 2019)*, Yogyakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2020. doi: 10.2991/assehr.k.201221.013.
- [8] Y. Nugroho, N. Ermawati, dan N. Suhardianto, "Pelaporan Environment Social Governance (ESG) dari Sudut Pandang Filsafat Jawa Berdimensi 'Hamemayu Hayuning Bawana,'" *Akunt. J. Akunt. Integratif*, vol. 9, no. 1, hlm. 1–18, Agu 2023, doi: 10.29080/jai.v9i1.1177.
- [9] Y. Rohayati dan A. Abdillah, "Digital Transformation for Era Society 5.0 and Resilience: Urgent Issues from Indonesia," *Societies*, vol. 14, no. 12, hlm. 266, Des 2024, doi: 10.3390/soc14120266.
- [10] S. Shahidi Hamedani, S. Aslam, B. A. Mundher Oraibi, Y. B. Wah, dan S. Shahidi Hamedani, "Transitioning towards Tomorrow's Workforce: Education 5.0 in the Landscape of Society 5.0: A Systematic Literature Review," *Educ. Sci.*, vol. 14, no. 10, hlm. 1041, Sep 2024, doi: 10.3390/educsci14101041.
- [11] H. F. Qodary dan S. Tambun, "PENGARUH ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG) DAN RETENTION RATIO TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING," *Juremi J. Ris. Ekon.*, vol. 1, no. 2, hlm. 159–172, Sep 2021, doi: 10.53625/juremi.v1i2.266.
- [12] W. A. Winarno, T. Sawarjuwono, dan Universitas Airlangga, "KRITIK ATAS TRIPLE BOTTOM LINE: PERSPEKTIF MEMAYU HAYUNING BAWANA," *J. Akunt. Multiparadigma*, vol. 12, no. 1, Apr 2021, doi: 10.21776/ub.jamal.2021.12.1.07.

- 
- [13] F. Noorzeha dan Lasiyo, "MEMAYU HAYUNING BAWANA: MEMAHAMI ESENSI GOTONG ROYONG DALAM NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT JAWA," *Sanjiwani J. Filsafat*, vol. 14, no. 2, hlm. 109–122, Sep 2023, doi: 10.25078/sjf.v14i2.2986.
- [14] A. T. Sulistiyani, Sutarno, P. Setyono, dan R. D. Wahyunengseh, "The local elites perception of 'Hamemayu Hayuning Bawana' philosophies in the Green Village Program in Yogyakarta Province," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 724, no. 1, hlm. 012099, Apr 2021, doi: 10.1088/1755-1315/724/1/012099.
- [15] M. A. Yordan, N. A. S. Buana, W. R. Meivan, dan A. F. Hidayatullah, "THE CONCEPT OF MEMAYU HAYUNING BAWANA AS A JAVANESE SPIRITUAL LIFESTYLE IN PROTECTING THE ENVIRONMENT," *Falasifa J. Studi Keislaman*, vol. 15, no. 2, 2024.
- [16] I. Femianti dan A. O. S. Zein, "Penerapan Konsep Hamemayu Hayuning Bawana pada Desain Interior," *E-Proceeding*, vol. 2, no. 2, hlm. 1–13, Agustus 2023.
- [17] Sugiyono, *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [18] R. E. Stake, *Multiple Case Study Analysis*. New York: The Guilford Press, 2006.
- [19] G. E. Marcus, "Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography," *Annu. Rev. Anthropol.*, vol. 24, hlm. 95–117, 1995.
- [20] C. Cassel dan G. Symon, "Assessing 'Good' Qualitative Research in The Work Psychology Field: A Narrative Analysis," *J. Occup. Organ. Psychol.*, vol. 84, no. 4, hlm. 195–201.
- [21] Fx. E. A. Riyanto, "'HAMEMAYU HAYUNING BAWONO' ('To beautify the beauty of the world'): A Javanese Philosophical Foundation of the Harmony for Interfaith Dialogue," dipresentasikan pada International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021), Malang, Indonesia, 2022. doi: 10.2991/assehr.k.220206.047.
- [22] S. Ahmad, S. Umirzakova, G. Mujtaba, M. S. Amin, dan T. Whangbo, "Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions," 2023, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2307.15846.
- [23] M. Yahya dan A. Martha, "Guru Profesional dengan Tantangan Tugas, Fungsi, serta Perannya dalam Meningkatkan Kompetensi Pendidikan," *JEM J. Edumatika*, vol. 1, no. 2, hlm. 60–70, 2025.
- [24] L. Qayyimah, A. P. Putra, P. A. Rizaldy, S. Supriyadi, dan A. Izzatika, "Peran Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Society 5.0," *Educatio*, vol. 19, no. 2, hlm. 243–252, Des 2024, doi: 10.29408/edc.v19i2.27688.
- [25] Hartinah, R. H. Maulana, dan Y. A., "INTEGRATING SPIRITUAL VALUES INTO EDUCATIONAL LEADERSHIP TO FOSTER THE FUTURE GENERATION," *LEADERIA J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 6, no. 1, hlm. 48–56, Jun 2025.
-